



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-814/MK.02/2015

16 Oktober 2015

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2016

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja

2. Jaksa Agung RI

3. Kepala Kepolisian RI

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Undang-Undang tentang APBN TA 2016 tanggal 16 Oktober 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga TA 2016 yang terbaru tercantum dalam Lampiran I, sedangkan kebijakan dan kriteria pemanfaatannya tercantum dalam Lampiran II.
2. Berdasarkan pagu tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk segera melakukan penyesuaian terhadap RKA-K/L TA 2016, dengan menggunakan rumusan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Kementerian/Lembaga, dan melaksanakan pembahasan (konsultasi) dengan komisi terkait di DPR RI berkenaan dengan penyesuaian RKA-K/L TA 2016 tersebut.
3. Hasil penyesuaian RKA-K/L dijadwalkan akan disampaikan oleh masing-masing komisi kepada Badan Anggaran DPR RI paling lambat 21 Oktober 2015.
4. Persetujuan atas RKA-K/L pagu alokasi anggaran TA 2016 ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (6) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR (format persetujuan komisi tercantum dalam Lampiran III).
5. Dapat diinformasikan bahwa pagu alokasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut telah disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran kepada masing-masing Komisi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dalam penyelesaian RKA-K/L TA 2016, diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan

Bambang P.S. Brodjonegoro

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan DPR RI;
4. Ketua Badan Anggaran DPR RI;
5. Ketua Komisi I s.d XI DPR RI;
6. Direktur Jenderal Anggaran.